

**IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH MENUJU PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA (STUDI KASUS DI DESA KOTO DUA LAMA
KECAMATAN AIR HANGAT)**

**VENO RAHMAD ILLAHI
STIA NUSANTARA SAKTI SUNGAI PENUH**

Email:

Venorahmad7@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Desa Koto Dua Lama Kecamatan Air Hangat dengan rumusan masalah yakni bagaimanakah Implementasi Otonomi Daerah menuju pemberdayaan masyarakat desa (Studi Kasus di Desa Koto Dua Lama Kecamatan Air Hangat). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Otonomi Daerah Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Koto Dua Lama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana data diperoleh dengan wawancara di Desa Koto Dua Lama kepada 7 orang orang informan yang kemudian dilakukan analisis data dengan triangulasi data sehingga dapat memperoleh informasi yang akurat. Kesimpulan dari penelitian ini terdapat masalah dalam pendapatan desa yang belum murni hasil dari potensi Desa Koto Dua Lama yang masih berpatok pada bantuan dari pemerintah dan juga belum adanya sosialisasi kepada masyarakat desa tentang pengertian Otonomi Daerah. Perlu adanya perhatian khusus mengenai pendapatan, pemberdayaan masyarakat desa dan pemahaman masyarakat desa tentang sistem pemerintahan Otonomi Daerah agar desa lebih mandiri dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan juga meningkatkan potensi masyarakat desa agar masyarakat desa lebih berkembang lagi pola pikir seperti mengadakan lebih banyak lagi pelatihan untuk masyarakat desa dan meningkatkan sumber daya manusianya hal seperti ini sangat perlu di perhatikan oleh pemerintah desa dikarenakan sangat diperlukan pemberdayaan masyarakat desa, pemahaman, dan pendapatan agar perkembangan desa lebih baik dari tahun sebelumnya.

Kata Kunci : Implementasi, Otonomi Daerah, Pemberdayaan

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia sedang berada di tengah masa transformasi dalam hubungan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 hanya merupakan kepanjangan tangan pusat di daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah telah dibuka saluran baru bagi pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat setempat, untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pada prinsipnya acuan dasar dari otonomi daerah telah diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, selanjutnya peraturan pemerintah Nomor 104, 105, 106, 107, 108, 109, dan 110 Tahun 2000 dan ketentuan lainnya yang relevan. Dalam acuan dasar tersebut setiap daerah harus membentuk suatu paket otonomi yang konsisten dengan kapasitas dan kebutuhannya. Dalam Negara yang majemuk seperti Indonesia, satu ukuran belum tentu cocok untuk semua. Penyusunan paket otonomi dalam perancangannya. Dalam proses ini komunitas-komunitas lokal perlu dilibatkan oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota, termasuk DPRD untuk menjamin proses desentralisasi secara lebih baik dan bertanggung jawab, dimana mereka sebagai salah satu stakeholder yang memiliki kepentingan mendalam untuk mensukseskan otonomi daerah.

Otonomi daerah ini merupakan fenomena politis yang sangat dibutuhkan dalam era globalisasi dan demokrasi apalagi jika dikaitkan dengan tantangan masa depan memasuki era perdagangan bebas yang antara lain ditandai dengan tumbuhnya berbagai bentuk kerja sama regional, perubahan pola atau sistem informasi global. Melalui otonomi daerah diharapkan daerah akan mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi yang wajar, efisien, efektif, termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja, mempertanggungjawabkan kepada pemerintah atasannya maupun kepada publik/masyarakat.

Dari latar belakang yang penulis paparkan di atas maka fenomena yang terjadi adalah :

1. Dalam konteks kewenangan pusat dan daerah dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah belum sepenuhnya bisa terlaksana dengan baik.
2. Disatu sisi, pemerintah belum melaksanakan kegiatan otonomi daerah yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
3. juga belum adanya pemberian pemahaman kepada lapisan masyarakat tentang otonomi daerah itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH MENUJU PEMBERDAYAAN**

MASYARAKAT DESA, (Studi Kasus Di Desa Koto Dua Lama Kecamatan Air Hangat)”

1.1 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian dimana penulis melihat beberapa permasalahan dilapangan tentang implementasi otonomi daerah menuju pemberdayaan masyarakat desa di Desa Koto Dua Lama Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci diantaranya adalah:

1. Belum terlihat pemberdayaan masyarakat Desa Koto Dua Lama sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Otonomi Daerah
2. Belum adanya pemahaman masyarakat Desa Koto Dua Lama tentang Otonomi Daerah
3. Perlu pemerintah yang lebih tinggi untuk melakukan sosialisasi pada masyarakat desa tentang pengertian Otonomi Daerah

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka yang menjadi rumusan masalah yakni bagaimanakah Implementasi Otonomi Daerah menuju pemberdayaan masyarakat desa (Studi Kasus di Desa Koto Dua Lama Kecamatan Air Hangat) ?

Tinjauan Pustaka

Pengertian Implementasi

Implementasi adalah bagian dari proses kebijakan publik, disamping tahapan sebelumnya agenda pengaturan, formulasi, adopsi dan tahapan sesudahnya penilaian.

Sedangkan menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier mendefinisikan implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Pengertian Otonomi

Otonomi merupakan penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat.

Pengertian Daerah

Daerah, dalam konteks pembagian administratif di Indonesia, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Peranan masyarakat dan swasta dalam pembangunan daerah akan semakin besar dan menentukan. Perlu kita sadari tanpa meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta, otonomi akan kehilangan makna dasarnya. Melalui otonomi, pemerintah daerah mempunyai peluang yang lebih besar untuk mendorong dan member motivasi membangun daerah yang kondusif, sehingga akan munculnya kreasi dan daya inovasi masyarakat yang dapat bersaing dengan daerah lain. Disamping itu, daerah dapat membangun pusat pertumbuhan daerah, mengingat daerah lebih akrab dengan masyarakat dan lingkungannya.

Pengertian Desa

Dari dulu hingga saat ini, desa senantiasa menjadi fokus perhatian dalam setiap pembahasan tentang sistem pemerintahan daerah maupun sistem pemerintahan nasional, karena desa merupakan subsistem dari sistem pemerintahan daerah.

Indikator

1. Politik
2. Ekonomi
3. Sosial dan budaya.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sukmadinata (2009), metode kualitatif adalah penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang fenomena, peristiwa, kepercayaan, sikap dan aktivitas sosial untuk individual maupun kelompok. Metode kualitatif merupakan kumpulan metode untuk menganalisis dan memahami lebih mengenai makna beberapa individu maupun kelompok dianggap sebagai masalah kemanusiaan atau masalah sosial (Creswell, 2015).

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di salah satu desa yaitu desa Koto Dua Lama Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci.

Jenis dan Sumber Data

Metode penarikan informan adalah merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian (Sugiyono, 2003;19). Dalam penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, yaitu penelitian yang memaparkan apa yang terjadi dalam sebuah kancan, lapangan atau wilayah tertentu (Arikunto, 2010;198). Informan dengan kriteria yaitu : perangkat desa, BPD dan juga masyarakat desa

Teknik Pemilihan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini adalah teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Sugiono, (2007;91). Dalam penelitian kualitatif proses sampling yang terpenting adalah bagaimana menentukan informan kunci atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi sesuai dengan fokus penelitian. Bugin, (2003;530, Pemilihan informan kunci diperoleh secara *purposive sampling* yaitu sampel yang diambil secara sengaja dan informan biasa dilakukan dengan cara

puposife sampling yaitu sampel yang ditemukan berdasarkan ketentuan dari peneliti di lokasi penelitian yaitu di desa Koto Dua Lama.

Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akan dianalisis dalam penelitian ini tentang implementasi otonomi daerah dalam menuju pemberdayaan masyarakat desa maka penulis menggunakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (sugiyono, 2012;224).

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

Penelitian Perpustakaan (Library Research)

Penelitian ini untuk mendapatkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dilapangan melalui literatur-literatur ataupun referensi-referensi, untuk mencari landasan teori yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dibahas, serta buku-buku yang menunjang proposal penelitian.

Penelitian Lapangan

Penelitian ini merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara turun langsung ke objek yang diteliti untuk mendapatkan data primer dengan cara:

a. Wawancara

Menurut (Sugiyono, 2007;72). Wawancara adalah pertemuan untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam (indepth penelitian).

b. Studi dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya menumental seseorang. Dokumen berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, pengaturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

c. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengmpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan teknik ini, sekaligus langsung juga menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kreadibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Menurut Norman K. Denkin (2006;134) triangulasi data:

1. Triangulasi Sumber Data

Pengecekan data dan membandingkan fakta dan sumber lain, sumber tersebut berupa informan yang berbeda, meminta umpan balik dari informan, umpan balik tersebut berguna untuk memperbaiki kualitas data dan kesimpulan yang ditarik dari data tersebut.

2. Obsevasi

Obsevasi merupakan proses pemorelahan data dari tangan pertama, dengan cara melakukan pengamatan orang serta lokasi dilakukannya penelitian dan juga metode yang sifatnya akurat dan spesifik untuk mengumpulkan data dan mencari informasi mengenai segala kegiatan yang dijadikan obyek kajian penelitian.

Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, seorang peneliti biasanya menggunakan instrument pengumpulan data. Dengan demikian, kedudukan suatu skala atau instrument pengumpulan data dalam proses penelitian sangat penting karena kondisi data tergantung alat yang dibuat. Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Pena/pensil
2. Buku tulis
3. Alat rekaman
4. Laptop/Hp

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

1. Reduksi Data

Merupakan proses pemilihan, pemusatan pada penyederhanaan, mengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dimana setelah peneliti memperoleh data, harus lebih dulu dikaji kelayakannya dengan memilih data mana yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Penyajian Data

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang disesuaikan dan di klarifikasi untuk mempermudah peneliti dan menguasai data tidak terbenam dalam setumpuk data

3. Verifikasi (menarik kesimpulan)

Kesimpulan selama penelitian berlangsung makna-makna yang muncul dari data yang diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya sehingga diperoleh kesimpulan yang jelas kebenaran dan kegunaannya.

Teknik Keabsahan Data

Syarat bagi analisis data adalah adanya data yang valid dan reliabel,. Untuk mewujudkannya dalam kegiatan penelitian kualitatif dilakukan validasi data. Mengacu pada Moleong untuk membuktikan validitas data ditentukan oleh kredibilitas temuan dan interpretasinya dengan mengupayakan temuan dan penafsiran yang dilakukan sesuai dengan kondisi yang senyatanya dan di setujui oleh subjek penelitian. Agar data valid dalam penelitian kualitatif maka peneliti melakukan :

1. Triangulasi
2. Menganalisis dengan cermat kasus
3. Menggunakan bahan referensi.

Unit Analisis

Menurut Sugiono (2012;02), unit analisis adalah satuan subjek yang akan di analisis, dalam penelitian ini subjeknya adalah di pemerintahan desa Koto Dua Lama objeknya adalah mengenai implementasi otonomi daerah menuju pemberdayaan masyarakat desa di Desa Koto Dua Lama

III. PEMBAHASAN PENELITIAN

Pembahasan

Dari jawaban informan mengenai bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di lihat dari segi politik di Desa Koto Dua Lama dapat ditarik kesimpulan, “ Dari segi politik ini pemerintah desa dan masyarakat desa telah menerapkan sesuai dengan sistem otonomi daerah, yang mana pemerintah desa dan masyarakat desa telah melaksanakannya dengan mandiri. Namun masih belum adanya sosialisasi dari pemerintah desa tentang pengertian dan pemahaman sistem otonomi daerah kepada masyarakat desa.”

Dari jawaban informan mengenai bagaimana pemberdayaan masyarakat di Desa Koto Dua Lama dilihat dari sisi politik dapat ditarik kesimpulan, “ pemerintah desa telah melaksanakan dengan baik seperti pengambilan keputusan dan juga memberikan pemahaman terhadap masyarakat desa tentang bagaimana seharusnya masyarakat dalam memilih pemimpin desa yang baik.”

Dari jawaban informan mengenai bagaimana pelaksanaan otonomi daerah dari segi ekonomi di Desa Koto Dua Lama dapat ditarik kesimpulan, “Desa Koto Dua Lama di dalam segi ekonomi dan pendapatan masih mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat seperti ADD (anggaran dana desa), DD (dana desa), PBH (pajak bagi hasil daerah), dan bantuan provinsi. Tetapi di balik itu pemerintah desa masih berupaya dalam hal ekonomi ini karena Desa Koto Dua Lama masih mengandalkan bantuan pemerintah pusat dalam mengembangkan desa, tetapi pemerintah desa sudah mulai membuat program BUMDES untuk perkembangan ekonomi desa.”

Dari jawaban informan mengenai bagaimana pemberdayaan masyarakat di Desa Koto Dua Lama di lihat dari sisi ekonomi dapat ditarik kesimpulan, “ untuk pemberdayaan masyarakat pemerintah desa mengadakan pelatihan untuk masyarakat desa demi meningkatkan wawasan dan potensi masyarakat desa.”

Dari jawaban informan mengenai apakah pelaksanaan otonomi daerah di Desa Koto Dua Lama berdampak pada sosial dan budaya dapat ditarik kesimpulan, “ untuk dampak dalam sosial dan budaya di desa tidak ada perubahan yang signifikan masih seperti biasanya.”

Dari jawaban informan mengenai apakah pemberdayaan masyarakat desa di Desa Koto Dua Lama mempengaruhi sosial dan budaya masyarakat setempat, “ sosial dan budaya masyarakat desa tidak berubah dalam skala besar hanya saja nilai sosial antara masyarakat dengan pemerintah desa menjadi lebih dekat dan terbuka membuat masyarakat jadi lebih peduli terhadap perkembangan dan kemajuan desa.”

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka hasil dari penelitian ini adalah :

Penerapan pemerintahan desa Koto Dua Lama telah dilaksanakan dengan peraturan Otonomi Daerah yang sesuai dengan undang-undang nomor 09 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah yang berlaku sekarang ini.

Pendapat dari beberapa staf perangkat desa dan beberapa masyarakat desa Koto Dua Lama yang saya wawancara berpendapat bahwa untuk

1. Dalam segi politik pemerintah desa telah menerapkan sistem otonomi daerah yang mana pemerintah desa telah mengurus urusan politik sendiri dan pemerintah desa juga memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam hal mengambil keputusan yang tepat. Pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah desa melakukannya dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat desa tentang bagaimana pengambilan keputusan terhadap kemajuan desa dan juga transparan terhadap masyarakat desa.
2. Sumber ekonomi desa masih mengandalkan pada bantuan pemerintah seperti ADD, DD dan Bantuan Provinsi, dikarenakan di desa Koto Dua lama belum terbentuknya BUMDES untuk meningkatkan pendapatan desa agar lebih mandiri lagi yang mana tertera dalam sistem Otonomi Daerah tersebut. Dan untuk pemberdayaan masyarakat desa dalam sisi ekonomi pemerintah desa mengadakan pelatihan untuk meningkatkan potensi masyarakat desa dalam memajukan dan memakmurkan masyarakat desa.
3. Dalam sosial dan budaya di desa masih sama seperti biasanya, selama di terapkannya sistem otonomi daerah ini membuat pemerintah desa menjadi lebih leluasa dan bebas dalam melakukan pemberdayaan dan perkembangan masyarakat dan desa. Dan untuk di kalangan masyarakat sosial dan budaya juga tidak berubah begitu besar masih sama seperti biasanya hanya saja nilai sosial masyarakat terhadap perkembangan dan kemajuan desa menjadi lebih meningkat.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada LPPM STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh yang telah memberi kesempatan untuk publish jurnal di OJS Jurnal Administrasi Nusantara Maha (JAN MAHA), serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino Leo. 2012. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta
Hasbullah. 2006. Otonomi Pendidikan. Jakarta : Rajawali
K. Norman. 2006. Pengertian Triangulasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Moleong. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
Nurcholis Hanif. 2011. Pemerintahan Desa. NA : Erlangga
Raut Rahyanir. 2015. Pemerintah Desa. Yogyakarta : Zanafa Publishing

- Rosidin Utang. 2010. Otonomi Daerah dan Desentralisasi : Dilengkapi Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Bandung : Pustaka Setia
- Sinaga Obstar. 2010. Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik. Bandung : Lepsindo
- Sugiyono. 2004. Metode Penelitian. Bandung : Alfabet
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung : Alfabet
- Sukmadinata. 2009. Pengertian Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Subejo dan Supriyanto. 2004. Metodologi Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat, *Short On Rural Empowerment (SORem)* ugm tanggal 16 mei 2004
- Widjaja Haw. 2011. Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom. Depok : Rajawali Pers
- Wasistiono dan Tahir. 2006. Pengertian Desa. Bandung : CV. Fokus Media
- Undang-undang nomor 5 tahun 1974. Tentang otonomi daerah
- Undang-undang nomor 22 tahun 1999. Tentang pemerintahan daerah
- Undang-undang nomor 32 tahun 2004. Tentang pemerintahan daerah
- Undang-undang nomor 23 tahun 2014. Tentang pemerintahan daerah
- Undang-undang nomor 2 tahun 2015. Tentang pemerintahan daerah
- Undang-undang nomor 9 tahun 2015. Tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah